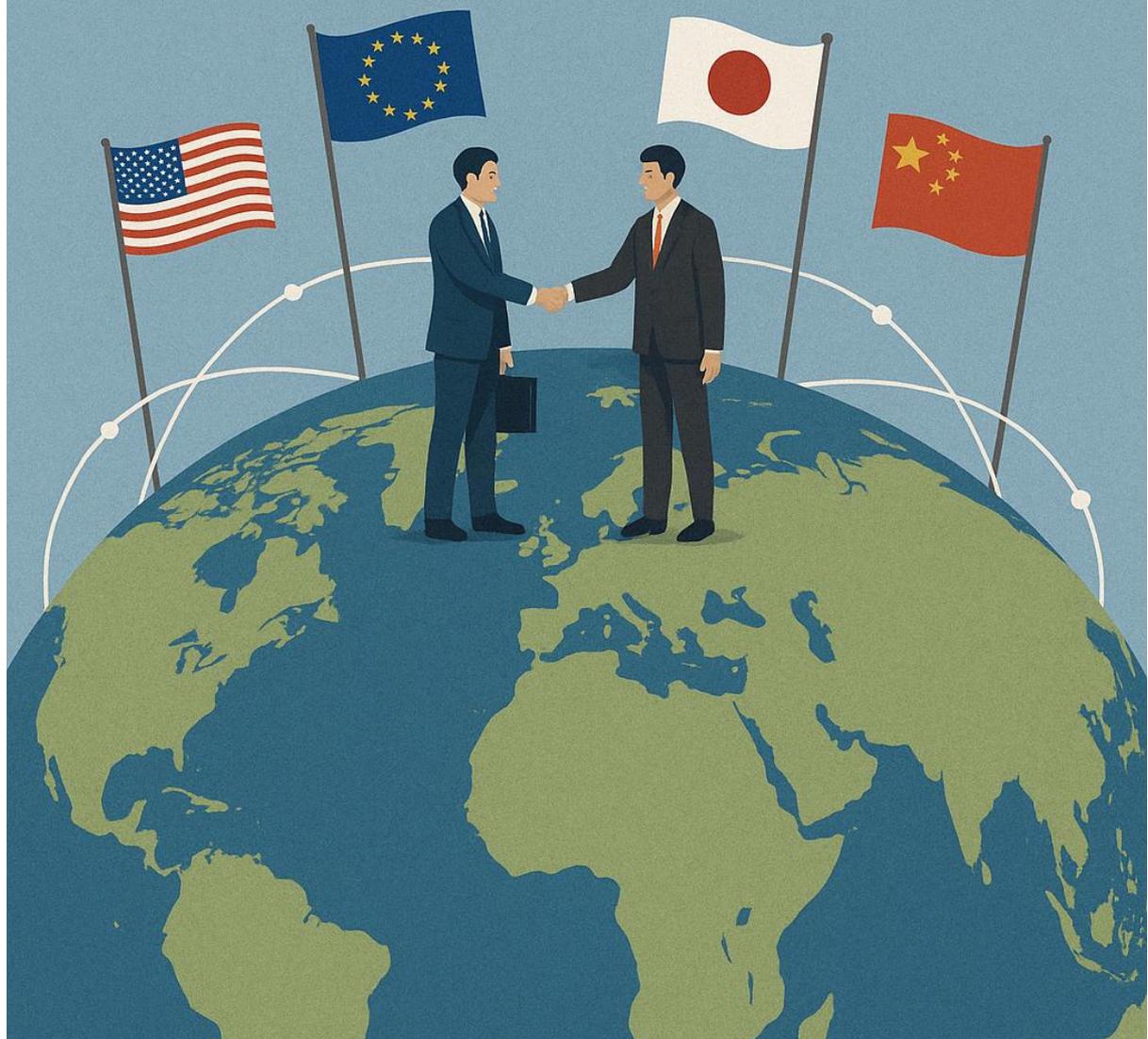


DIPLOMASI EKONOMI DI ERA MULTIPOLAR DUNIA

RUDY C. TARUMINGKENG



*Rudy C Tarumingkeng: Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia -
Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Guru Besar Manajemen, NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988)

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar IPB-University, Bogor (2005-2006)

Ketua Senat Akademik IBM-ASMI, Jakarta

© RUDYCT e-PRESS

rudyc75@gmail.com

Bogor, Indonesia

14 Agustus 2025

Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia - Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis

Berikut adalah konsepsi artikel: "**Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia**" dengan subjudul "**Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis**"

Oleh: Rudy C. Tarumingkeng

Ringkasan

Diplomasi ekonomi kini menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam memperkuat posisi negara di panggung global, khususnya di tengah pergeseran dari sistem unipolar ke multipolar. Dalam lanskap ini, kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi tidak lagi terkonsentrasi pada satu atau dua kekuatan besar, melainkan tersebar di berbagai pusat kekuatan regional. Buku ini membahas bagaimana negara—terutama negara berkembang seperti Indonesia—dapat memanfaatkan diplomasi ekonomi untuk memperluas pengaruh melalui kemitraan strategis, membangun konektivitas perdagangan, mengamankan rantai pasok, serta memajukan kepentingan nasional di tengah dinamika global yang berubah cepat.

Daftar Isi

Pendahuluan: Dunia dalam Transisi Multipolar

Diplomasi Ekonomi: Konsep, Ruang Lingkup, dan Relevansinya

Pergeseran dari Unipolar ke Multipolar: Konteks Global

Instrumen Utama Diplomasi Ekonomi

Kemitraan Strategis sebagai Pilar Diplomasi Ekonomi

Diplomasi Ekonomi dan Persaingan Geoekonomi

Indonesia dalam Pusaran Multipolaritas

**Studi Kasus: Kemitraan Strategis ASEAN, RCEP, dan Indo-Pacific
Economic Framework**

Transformasi Digital dan Diplomasi Ekonomi

Tantangan dan Hambatan Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar

Strategi Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis

Kesimpulan: Membangun Diplomasi Ekonomi yang Berdaya Saing

1. Pendahuluan: Dunia dalam Transisi Multipolar

Era multipolar adalah kondisi di mana tidak ada satu kekuatan tunggal yang mendominasi sistem internasional. Sebaliknya, kekuatan politik, ekonomi, dan militer terbagi di antara beberapa negara atau blok regional. Perkembangan ini mempersempit ruang dominasi hegemoni seperti yang pernah terjadi di masa Perang Dingin atau pasca-1990-an ketika Amerika Serikat menjadi satu-satunya superpower.

Dalam lanskap ini, diplomasi ekonomi menjadi semakin vital. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan militer atau pengaruh politik; keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada kemampuannya membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan,

mengakses pasar baru, serta memastikan keamanan pasokan sumber daya.

Contoh nyata adalah bagaimana Tiongkok membangun pengaruh globalnya melalui **Belt and Road Initiative (BRI)** yang menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan diplomasi perdagangan, atau Uni Eropa yang menggunakan kekuatan pasar tunggalnya untuk memengaruhi kebijakan negara mitra.

2. Diplomasi Ekonomi: Konsep, Ruang Lingkup, dan Relevansinya

Diplomasi ekonomi merujuk pada penggunaan sumber daya dan kebijakan ekonomi suatu negara untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Ruang lingkungnya mencakup:

Promosi perdagangan dan investasi

Negosiasi perjanjian dagang

Kerja sama pembangunan

Pengamanan rantai pasok strategis

Penguatan daya saing industri nasional

Diplomasi ekonomi bersifat multidimensi karena melibatkan sinergi antara kementerian luar negeri, kementerian perdagangan, kementerian keuangan, dan sektor swasta. Di era multipolar, ruang lingkungnya semakin luas karena interdependensi ekonomi antarnegara meningkat.

3. Pergeseran dari Unipolar ke Multipolar: Konteks Global

Sejak awal abad ke-21, muncul beberapa tren yang memperkuat multipolaritas:

Kebangkitan Tiongkok dan India sebagai kekuatan ekonomi besar.

Krisis keuangan global 2008 yang menggeser pusat pertumbuhan ke Asia.

Fragmentasi rantai pasok global akibat pandemi COVID-19.

Perang dagang dan persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok.

Kebangkitan blok-blok regional seperti BRICS+, ASEAN, dan Uni Afrika.

Dalam konteks ini, kekuatan ekonomi tidak hanya diukur dari GDP, tetapi juga dari pengaruh dalam membuat aturan global (rule-making power), penguasaan teknologi, dan kemampuan memobilisasi aliansi strategis.

4. Instrumen Utama Diplomasi Ekonomi

Negara memanfaatkan beragam instrumen untuk melaksanakan diplomasi ekonomi:

Perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kerja sama ekonomi komprehensif

Bantuan pembangunan dan investasi infrastruktur

Promosi merek negara (nation branding)

Pusat perdagangan dan paviliun budaya

Pertemuan puncak ekonomi internasional (G20, APEC, dll.)

Diplomasi digital melalui platform e-commerce lintas negara

Instrumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam strategi besar diplomasi luar negeri.

5. Kemitraan Strategis sebagai Pilar Diplomasi Ekonomi

Kemitraan strategis (strategic partnership) dalam diplomasi ekonomi mencakup kerja sama jangka panjang yang melibatkan dimensi ekonomi, teknologi, dan keamanan. Contoh:

Kemitraan Indonesia–Jepang: Investasi infrastruktur dan pengembangan industri otomotif.

Kemitraan Uni Eropa–Afrika: Fokus pada pembangunan berkelanjutan dan transisi energi.

Kemitraan AS–ASEAN: Kolaborasi dalam teknologi digital dan keamanan maritim.

Kemitraan strategis yang efektif memerlukan keselarasan visi, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

6. Diplomasi Ekonomi dan Persaingan Geoekonomi

Di era multipolar, diplomasi ekonomi menjadi arena persaingan geoekonomi. Contohnya:

Persaingan investasi infrastruktur antara BRI (Tiongkok) dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (AS/G7).

Persaingan standar teknologi seperti 5G, AI, dan energi hijau.

Perlombaan mendapatkan sumber daya kritis seperti lithium dan cobalt untuk industri baterai.

Negara-negara harus mampu memanfaatkan peluang tanpa terjebak dalam ketergantungan strategis.

7. Indonesia dalam Pusaran Multipolaritas

Indonesia memiliki posisi strategis karena:

Letak geografis di jalur perdagangan Indo-Pasifik.

Keanggotaan di G20 dan peran sentral di ASEAN.

Potensi pasar domestik yang besar.

Sumber daya alam dan energi terbarukan yang melimpah.

Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan seperti meningkatkan daya saing industri, memperkuat infrastruktur, dan mengelola hubungan dengan berbagai kekuatan besar tanpa kehilangan otonomi kebijakan.

8. Studi Kasus: Kemitraan Strategis ASEAN, RCEP, dan IPEF

ASEAN: Memperkuat integrasi pasar regional melalui ASEAN Economic Community.

RCEP: Perjanjian dagang terbesar dunia yang mencakup 30% GDP global.

Indo-Pacific Economic Framework (IPEF): Inisiatif AS untuk membentuk arsitektur ekonomi Indo-Pasifik.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi tidak hanya soal negosiasi dagang, tetapi juga membangun norma dan standar baru.

9. Transformasi Digital dan Diplomasi Ekonomi

Teknologi digital menjadi pendorong utama diplomasi ekonomi modern:

E-commerce lintas negara memperluas akses pasar UMKM.

Big data dan AI digunakan untuk menganalisis peluang perdagangan.

Blockchain membantu transparansi rantai pasok.

Platform digital memfasilitasi diplomasi publik dan promosi investasi.

Negara yang mampu memadukan diplomasi ekonomi dengan transformasi digital akan lebih unggul dalam kompetisi global.

10. Tantangan dan Hambatan Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar

Beberapa hambatan yang sering muncul:

Proteksionisme dan perang tarif.

Fragmentasi standar teknis antarnegara.

Isu HAM dan lingkungan yang memengaruhi hubungan dagang.

Ketidakpastian geopolitik yang mengganggu stabilitas pasar.

Persaingan narasi di media global.

11. Strategi Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis

Strategi yang dapat ditempuh:

Diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan.

Penguatan kapasitas diplomasi ekonomi melalui pelatihan negosiator dan diplomat ekonomi.

Integrasi sektor swasta dan pemerintah dalam perumusan strategi.

Diplomasi energi untuk mengamankan pasokan dan pasar.

Konektivitas infrastruktur untuk memperlancar arus barang dan jasa.

Penguatan peran Indonesia di forum internasional sebagai pembentuk aturan (rule-maker) bukan sekadar pengikut (rule-taker).

12. Kesimpulan: Membangun Diplomasi Ekonomi yang Berdaya Saing

Era multipolar bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang bagi negara-negara yang cerdas memanfaatkan diplomasi ekonomi. Dengan strategi

*Rudy C Tarumingkeng: Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia -
Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis*

kemitraan strategis yang tepat, integrasi teknologi, dan penguatan daya saing nasional, negara seperti Indonesia dapat memperluas pengaruhnya di panggung global sambil menjaga kemandirian.

Diplomasi ekonomi di abad ke-21 menuntut visi jangka panjang, fleksibilitas dalam negosiasi, dan kemampuan membangun aliansi yang saling menguntungkan. Di tengah persaingan geoekonomi, kemitraan strategis adalah jembatan menuju masa depan yang lebih sejahtera dan stabil.

Baik, saya tambahkan **Tabel Peta Aktor & Kekuatan Ekonomi Multipolar** agar buku "*Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia*" ini lebih komprehensif dan visual.

Lampiran Tabel – Peta Aktor & Kekuatan Ekonomi Multipolar

Aktor / Blok Ekonomi	Kekuatan Utama	Instrumen Diplomasi Ekonomi	Kepentingan Strategis	Implikasi bagi Indonesia
Amerika Serikat (AS)	GDP terbesar kedua dunia; kekuatan teknologi dan militer global	Perjanjian perdagangan bilateral, sanksi ekonomi, <i>Partnership for Global Infrastructure and Investment</i> , IPEF	Menjaga dominasi teknologi, mengamankan rantai pasok strategis, membendung pengaruh Tiongkok	Peluang ekspor teknologi tinggi; risiko tekanan geopolitik dalam isu Indo-Pasifik
Tiongkok (RRT)	GDP terbesar kedua; pusat manufaktur dunia; cadangan devisa besar	<i>Belt and Road Initiative</i> (BRI), FTA bilateral dan regional, diplomasi infrastruktur	Memperluas pengaruh melalui konektivitas infrastruktur dan akses pasar	Akses investasi infrastruktur; potensi ketergantungan utang jika tidak dikelola hati-hati

*Rudy C Tarumingkeng: Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia -
Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis*

Aktor / Blok Ekonomi	Kekuatan Utama	Instrumen Diplomasi Ekonomi	Kepentingan Strategis	Implikasi bagi Indonesia
Uni Eropa (UE)	Pasar tunggal terbesar; kekuatan regulasi (<i>normative power</i>)	Perjanjian dagang bebas (FTA), <i>Green Deal</i> , standar keberlanjutan global	Menjaga kepemimpinan standar global, memperluas pasar untuk industri hijau	Peluang ekspor produk berkelanjutan; tantangan pemenuhan standar lingkungan
India	Ekonomi besar berkembang pesat; pusat teknologi IT global	Diplomasi teknologi, perjanjian perdagangan Selatan–Selatan, <i>Act East Policy</i>	Memperluas pasar dan pengaruh di Asia–Afrika	Potensi kerja sama teknologi dan farmasi; kompetisi di sektor tekstil
Rusia	Sumber energi dan komoditas strategis; kekuatan militer	Diplomasi energi, perjanjian pasokan gas & minyak, BRICS+	Mengamankan pasar energi, menghindari isolasi Barat	Potensi kerja sama energi; risiko sanksi sekunder
Jepang	Ekonomi teknologi maju; investor utama di Asia	FTA, <i>Official Development Assistance</i> (ODA), investasi	Menjaga stabilitas rantai pasok dan investasi Asia	Sumber investasi dan teknologi; peluang di industri otomotif &

*Rudy C Tarumingkeng: Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia -
Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis*

Aktor / Blok Ekonomi	Kekuatan Utama	Instrumen Diplomasi Ekonomi	Kepentingan Strategis	Implikasi bagi Indonesia
		industri manufaktur		energi terbarukan
BRICS+ (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dll.)	Gabungan pasar besar dan sumber daya alam	<i>New Development Bank</i> , perjanjian perdagangan intra-blok	Menciptakan sistem keuangan alternatif, mengurangi dominasi USD	Peluang diversifikasi pasar ekspor; akses pembiayaan alternatif
ASEAN	Pertumbuhan ekonomi cepat; pasar gabungan 600 juta penduduk	ASEAN Economic Community, FTA dengan mitra utama	Memperkuat integrasi ekonomi regional	Memperluas pasar intra-ASEAN; peran sentral Indonesia sebagai pemimpin kawasan
Afrika (Uni Afrika)	Sumber daya mineral strategis; pasar konsumen tumbuh cepat	AfCFTA (<i>African Continental Free Trade Area</i>), kemitraan Selatan–Selatan	Integrasi pasar intra-Afrika dan kerja sama global	Potensi pasar baru dan kerja sama energi terbarukan

*Rudy C Tarumingkeng: Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia -
Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis*

Aktor / Blok Ekonomi	Kekuatan Utama	Instrumen Diplomasi Ekonomi	Kepentingan Strategis	Implikasi bagi Indonesia
Timur Tengah (GCC)	Kekayaan energi fosil; sovereign wealth funds besar	Investasi global, diplomasi energi, kerja sama teknologi	Diversifikasi ekonomi pasca-minyak	Potensi investasi infrastruktur dan industri halal

Analisis Strategis Tabel

AS & Tiongkok adalah poros persaingan utama, sehingga diplomasi Indonesia harus menjaga keseimbangan hubungan.

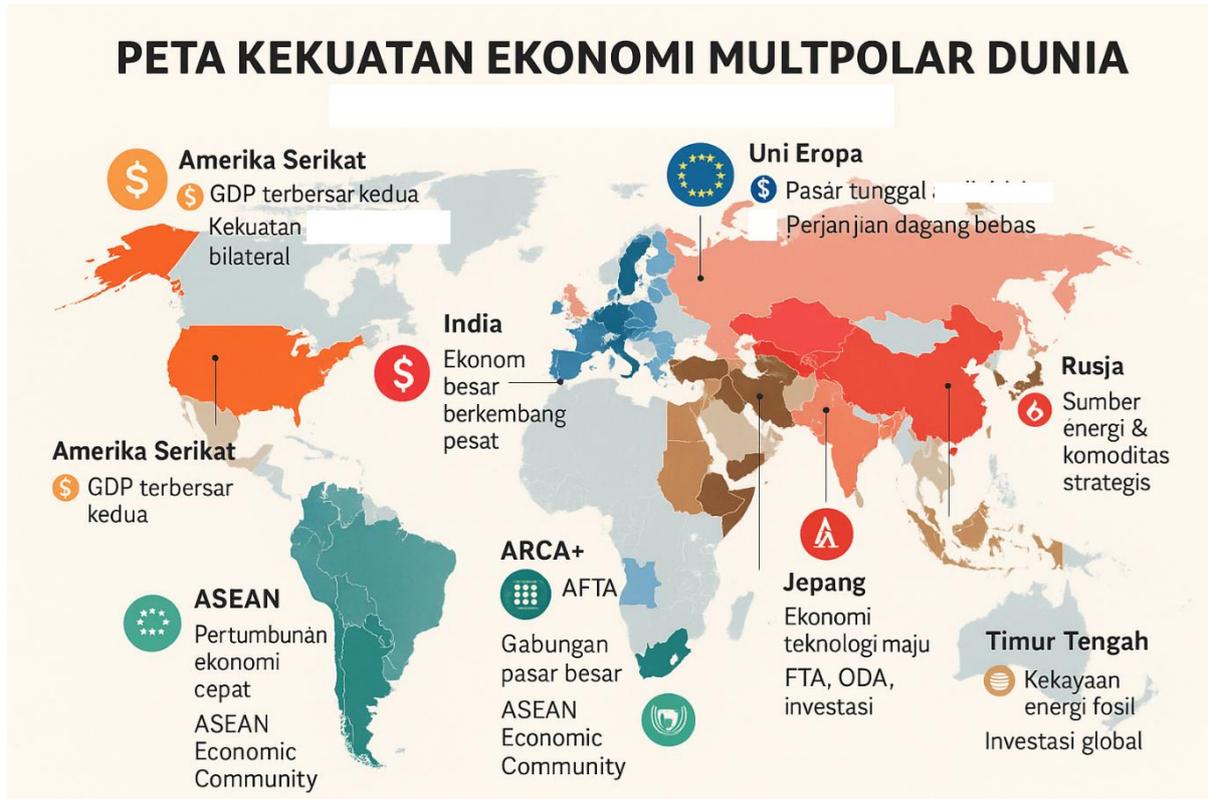
Uni Eropa & Jepang menawarkan kerja sama berbasis teknologi tinggi dan keberlanjutan.

India & BRICS+ memberikan alternatif pasar dan pendanaan non-Barat.

ASEAN menjadi basis integrasi pasar regional yang harus terus diperkuat.

Timur Tengah & Afrika adalah kawasan dengan potensi investasi dan sumber daya yang belum maksimal digarap.

*Rudy C Tarumingkeng: Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia -
Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis*



Refleksi dan Diskusi

Melengkapi buku "*Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia*", bagian ini bersifat akademis, naratif, dan mengintegrasikan teori, studi kasus, serta relevansi praktis khususnya bagi Indonesia.

Refleksi dan Diskusi

Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia: Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis

1. Refleksi atas Pergeseran Global ke Era Multipolar

Refleksi pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa pergeseran dari tatanan unipolar ke multipolar bukanlah fenomena yang tiba-tiba terjadi. Perubahan ini merupakan hasil akumulasi dari berbagai dinamika global—baik yang bersifat struktural seperti distribusi kekuatan ekonomi dan militer, maupun yang bersifat katalis seperti krisis finansial global, pandemi, dan percepatan teknologi digital.

Di masa lalu, diplomasi ekonomi sering kali menjadi perpanjangan dari politik luar negeri negara hegemon. Misalnya, pada dekade 1990-an dan awal 2000-an, AS menjadi aktor dominan dalam membentuk arsitektur ekonomi global melalui WTO, IMF, dan Bank Dunia. Namun, kini kita menyaksikan bagaimana Tiongkok, India, Uni Eropa, BRICS+, dan blok-blok regional seperti ASEAN mulai memainkan peran setara, menandakan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat sepenuhnya mendikte aturan main global.

Refleksi ini membawa kita pada pemahaman bahwa **strategi diplomasi ekonomi di era multipolar harus adaptif**, mengingat lanskap kekuatan

yang lebih terfragmentasi. Kesepakatan perdagangan kini lebih bersifat *plurilateral* dan *issue-based*, artinya negara dapat membentuk aliansi sesuai isu tertentu tanpa harus terikat secara penuh pada satu blok besar.

2. Diplomasi Ekonomi sebagai Alat Negosiasi Kekuasaan

Dalam sistem multipolar, diplomasi ekonomi tidak lagi sekadar instrumen perdagangan, tetapi telah menjadi **alat negosiasi kekuasaan (power bargaining tool)**.

Terdapat tiga refleksi utama di sini:

Kekuatan Ekonomi sebagai Daya Tawar

Negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dapat menggunakan pasar domestiknya sebagai magnet bagi investor dan mitra dagang. Indonesia, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, berada dalam posisi strategis untuk menjadikan daya beli dan pasar dalam negerinya sebagai kartu tawar.

Diversifikasi Kemitraan

Dalam era multipolar, diversifikasi kemitraan adalah strategi untuk mengurangi ketergantungan. Tidak bijak bagi sebuah negara untuk terlalu bergantung pada satu mitra utama, baik itu AS, Tiongkok, maupun Uni Eropa.

Penggunaan Diplomasi Ekonomi untuk Mempengaruhi Norma Global

Negara-negara dapat menggunakan diplomasi ekonomi untuk mempengaruhi standar global, seperti yang dilakukan Uni Eropa dengan *European Green Deal* yang mempengaruhi kebijakan perdagangan negara lain.

3. Tantangan Etis dan Geopolitik dalam Diplomasi Ekonomi

Refleksi berikutnya adalah soal dilema etis dan geopolitik. Multipolaritas membawa peluang, tetapi juga risiko yang perlu diantisipasi:

Proteksionisme Terselubung: Negara bisa saja menggunakan isu lingkungan atau HAM sebagai alasan proteksi pasar.

Persaingan Teknologi: Standar teknologi yang berbeda dapat menciptakan *splintering* atau fragmentasi ekosistem digital global.

Politik Sanksi dan Balasan: Penggunaan sanksi ekonomi sebagai alat politik luar negeri masih lazim, dan negara berkembang sering menjadi korban efek domino.

Diskusi di sini penting: Apakah diplomasi ekonomi hanya sekadar alat untuk memaksimalkan keuntungan nasional, ataukah juga memiliki tanggung jawab moral terhadap stabilitas global? Jawaban ini akan menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia.

4. Peluang Indonesia: Dari Rule-Taker ke Rule-Maker

Indonesia selama ini cenderung menjadi **rule-taker**, yaitu pihak yang menerima aturan global tanpa terlibat aktif dalam pembentukannya.

Refleksi strategisnya adalah: bagaimana agar Indonesia menjadi **rule-maker** dalam isu-isu tertentu?

Beberapa bidang potensial:

Transisi energi: Mengajukan standar global untuk perdagangan karbon.

Ekonomi biru: Memimpin tata kelola perdagangan hasil laut berkelanjutan.

Ekonomi digital ASEAN: Menginisiasi kerangka kerja *digital trade* di kawasan.

Diskusi publik, akademisi, dan pembuat kebijakan perlu diarahkan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan komparatif dinamis.

5. Diplomasi Ekonomi dan Peran Sektor Swasta

Refleksi lain adalah bahwa keberhasilan diplomasi ekonomi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga sektor swasta.

Perusahaan multinasional Indonesia, seperti di bidang energi, perbankan, dan teknologi, dapat menjadi "aktor diplomasi" melalui investasi luar negeri, CSR lintas negara, dan inovasi teknologi.

Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi yang efektif memerlukan:

Sinergi BUMN, swasta, dan pemerintah

Pusat promosi perdagangan yang proaktif

Fasilitas pembiayaan ekspor dan investasi

6. Tantangan Internal Indonesia dalam Mengoptimalkan Diplomasi Ekonomi

Diskusi juga harus mencakup kendala internal, di antaranya:

Kapasitas negosiasi yang terbatas dibandingkan negara-negara besar.

Kurangnya koordinasi antar-kementerian.

Keterbatasan data dan riset pasar global.

Kualitas infrastruktur logistik yang belum optimal.

Hambatan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung ekspor dan investasi.

Refleksi ini menegaskan bahwa diplomasi ekonomi bukan hanya masalah kebijakan luar negeri, tetapi juga reformasi kebijakan domestik.

7. Dinamika Multipolaritas dan Strategi Kemitraan

Multipolaritas menciptakan kebutuhan untuk strategi kemitraan yang lebih fleksibel:

Kemitraan Simetris: Kesetaraan dalam kontribusi dan manfaat.

Kemitraan Asimetris: Negara kecil atau berkembang yang mendapat dukungan besar dari mitra kuat.

Kemitraan Regional: Mengandalkan kedekatan geografis untuk efisiensi biaya dan rantai pasok.

Diskusi strategisnya adalah menentukan kapan Indonesia perlu memilih mitra berdasarkan kesamaan nilai, kesamaan kepentingan ekonomi, atau pertimbangan geopolitik murni.

8. Diplomasi Ekonomi Digital: Tantangan Baru

Era digital membawa bentuk diplomasi ekonomi yang berbeda:

Perdagangan digital lintas batas: E-commerce menjadi kanal diplomasi ekonomi.

Ekonomi data: Akses dan perlindungan data menjadi isu strategis.

Inovasi teknologi: Persaingan AI, blockchain, dan teknologi hijau menjadi bagian dari kompetisi global.

Diskusinya: Indonesia harus memutuskan apakah akan menjadi **pengadopsi cepat (fast adopter)** atau **pengembang standar (standard setter)** dalam ekosistem digital global.

9. Studi Kasus Reflektif

Tiongkok dan BRI: Menawarkan pelajaran bahwa diplomasi ekonomi dapat mengubah lanskap geopolitik melalui infrastruktur.

Uni Eropa dan Standar Lingkungan: Menunjukkan bahwa kekuatan regulasi bisa menjadi alat ekonomi yang sangat efektif.

ASEAN: Mengajarkan pentingnya integrasi ekonomi regional untuk meningkatkan daya tawar di panggung global.

10. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan refleksi di atas, diskusi strategis menghasilkan beberapa rekomendasi:

Penguatan kapasitas negosiasi dan diplomasi ekonomi di Kementerian Luar Negeri, Perdagangan, dan Perindustrian.

Peta jalan kemitraan strategis berbasis sektor unggulan seperti energi terbarukan, pangan, dan teknologi digital.

Integrasi diplomasi ekonomi dengan strategi branding nasional.

Platform data intelijen ekonomi nasional untuk mendukung pengambilan keputusan.

Kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.

11. Penutup Refleksi

Diplomasi ekonomi di era multipolar bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Refleksi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia bergantung pada kemampuannya membaca tren,

*Rudy C Tarumingkeng: Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia -
Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis*

membangun kemitraan strategis, dan memainkan peran aktif dalam membentuk arsitektur ekonomi global.

Diskusinya menegaskan bahwa **diplomasi ekonomi adalah seni memadukan kepentingan nasional dengan realitas global**, di mana fleksibilitas, inovasi, dan kredibilitas menjadi modal utama.

Baik, berikut **Glosarium** untuk buku "*Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia*" yang mencakup istilah-istilah kunci, disusun secara alfabetis dan dengan penjelasan formal agar dapat menjadi rujukan pembaca.

Glosarium

AFTA (ASEAN Free Trade Area)

Kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN untuk menghapus atau mengurangi tarif dan hambatan non-tarif, guna memperkuat perdagangan intra-kawasan.

AfCFTA (African Continental Free Trade Area)

Perjanjian perdagangan bebas antarnegara Afrika yang bertujuan menciptakan pasar tunggal untuk barang dan jasa, meningkatkan perdagangan intra-Afrika, dan mendorong pembangunan ekonomi.

Aliansi Strategis (Strategic Alliance)

Kemitraan jangka panjang antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama dalam bidang ekonomi, teknologi, atau politik untuk mencapai tujuan bersama, tanpa membentuk entitas hukum baru.

Belt and Road Initiative (BRI)

Inisiatif global yang diluncurkan oleh Tiongkok pada 2013 untuk membangun konektivitas infrastruktur dan meningkatkan perdagangan melalui jalur darat dan laut yang terinspirasi dari Jalur Sutra kuno.

Blok Ekonomi

Sekelompok negara yang membentuk kerja sama ekonomi atau perdagangan melalui perjanjian formal untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan integrasi pasar.

BRICS+

Perluasan dari BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) dengan melibatkan negara-negara baru untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan.

Diplomasi Digital (Digital Diplomacy)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk media sosial dan platform digital, untuk mendukung tujuan diplomasi dan memperluas jangkauan pesan negara.

Diplomasi Ekonomi (Economic Diplomacy)

Upaya pemerintah dan aktor non-negara untuk memanfaatkan kebijakan, sumber daya, dan instrumen ekonomi guna mencapai tujuan politik luar negeri dan pembangunan ekonomi nasional.

Diversifikasi Pasar

Strategi memperluas tujuan ekspor ke berbagai negara atau kawasan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar tertentu.

FTA (Free Trade Agreement)

Perjanjian perdagangan bebas antara dua atau lebih negara yang mengatur penghapusan atau pengurangan tarif serta hambatan perdagangan lainnya.

Geoekonomi (Geo-economics)

Pendekatan dalam kebijakan internasional yang menekankan penggunaan alat ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik dan keamanan nasional.

Green Deal

Kebijakan Uni Eropa yang bertujuan mencapai netralitas karbon pada 2050 melalui transisi energi bersih, inovasi teknologi hijau, dan regulasi lingkungan yang ketat.

Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)

Kerangka kerja ekonomi yang diinisiasi Amerika Serikat untuk

memperkuat keterlibatan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik melalui kerja sama perdagangan, rantai pasok, energi bersih, dan anti-korupsi.

Integrasi Ekonomi Regional

Proses penyatuan kebijakan ekonomi dan pasar antarnegara di kawasan tertentu untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Kemitraan Asimetris

Hubungan kerja sama di mana salah satu pihak memiliki kekuatan atau sumber daya yang jauh lebih besar, namun tetap memberikan manfaat bagi pihak yang lebih lemah.

Kemitraan Simetris

Kerja sama antar pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan posisi tawar relatif seimbang.

Multipolaritas (Multipolarity)

Kondisi sistem internasional di mana kekuatan ekonomi, politik, dan militer terdistribusi di antara beberapa negara atau blok besar, tanpa dominasi tunggal.

Nation Branding

Upaya sistematis suatu negara untuk membangun citra positif di mata dunia internasional guna menarik investasi, pariwisata, dan kerja sama internasional.

ODA (Official Development Assistance)

Bantuan pembangunan resmi dari pemerintah negara maju kepada negara berkembang, biasanya dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak untuk proyek pembangunan ekonomi dan sosial.

Plurilateral Agreement

Perjanjian internasional yang melibatkan sejumlah negara (tidak semua anggota organisasi multilateral) yang memiliki kepentingan sama di bidang tertentu.

Proteksionisme

Kebijakan perdagangan yang membatasi impor melalui tarif, kuota, atau regulasi ketat untuk melindungi industri domestik.

Rule-Maker

Negara atau pihak yang berperan aktif dalam membentuk aturan dan standar internasional.

Rule-Taker

Negara atau pihak yang hanya mengikuti aturan internasional yang sudah ditetapkan tanpa terlibat aktif dalam pembentukannya.

Rantai Pasok Global (Global Supply Chain)

Jaringan produksi dan distribusi barang atau jasa yang mencakup berbagai negara dari tahap bahan baku hingga produk akhir.

Sanksi Ekonomi

Pembatasan perdagangan atau keuangan yang dikenakan oleh satu atau lebih negara terhadap negara lain untuk memengaruhi kebijakan atau perilakunya.

Sovereign Wealth Fund (SWF)

Dana investasi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah suatu negara, biasanya berasal dari surplus perdagangan, pendapatan sumber daya alam, atau cadangan devisa.

Transisi Energi

Perubahan dari penggunaan sumber energi fosil menuju sumber energi terbarukan demi keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi.

WTO (World Trade Organization)

Organisasi internasional yang mengatur perdagangan antarnegara dan berfungsi sebagai forum negosiasi, pengawasan, serta penyelesaian sengketa perdagangan.

Baik, berikut **Daftar Pustaka** untuk buku "*Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia*" yang memadukan sumber akademis, laporan resmi, dan publikasi internasional. Saya sertakan format gaya APA agar konsisten secara akademik.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Akademik

Baldwin, D. A. (2016). *Economic Statecraft*. Princeton University Press.

Bayne, N., & Woolcock, S. (2017). *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations* (4th ed.). Routledge.

Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (Eds.). (2013). *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press.

Hocking, B., & Melissen, J. (2015). *Diplomacy in the Digital Age*. Clingendael Institute.

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2011). *Power and Interdependence* (4th ed.). Longman.

Saner, R., & Yiu, L. (2014). International economic diplomacy: Mutations, challenges, and future developments. *The Hague Journal of Diplomacy*, 9(4), 311–332. <https://doi.org/10.1163/1871191X-12341279>

Strange, S. (1994). *States and Markets*. Continuum.

Laporan Internasional dan Regional

ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

European Commission. (2019). *The European Green Deal*. Brussels: European Union.

International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook: A Rocky Recovery*. Washington, DC: IMF.

*Rudy C Tarumingkeng: Diplomasi Ekonomi di Era Multipolar Dunia -
Memperluas Pengaruh melalui Kemitraan Strategis*

World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*. Washington, DC: World Bank.

World Trade Organization (WTO). (2023). *World Trade Report 2023: Re-globalization for a Secure, Inclusive and Sustainable Future*. Geneva: WTO.

Sumber Kebijakan dan Inisiatif Global

Government of Japan. (2022). *Japan's Official Development Assistance (ODA) White Paper*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Government of the United States. (2022). *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Fact Sheet*. Washington, DC: The White House.

Government of the People's Republic of China. (2021). *Belt and Road Initiative Progress Report*. Beijing: National Development and Reform Commission.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. Geneva: UNCTAD.

Artikel Analisis dan Opini

Allison, G. (2020). The new spheres of influence: Sharing the globe with other great powers. *Foreign Affairs*, 99(2), 30–40.

Kaplan, R. D. (2021). The return of great-power rivalry. *National Interest*, 172, 8–18.

Zakaria, F. (2020). *Ten Lessons for a Post-Pandemic World*. W. W. Norton & Company.

Kopilot artikel ini - tanggal akses: 14 Agustus 2025. Prompting dan Akun penulis ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/689dc8a0-3fbc-8330-a95f-b4e286431360) <https://chatgpt.com/c/689dc8a0-3fbc-8330-a95f-b4e286431360>)